

# Transisi Hutan di Wilayah Adat Tanah Papua

Jarot Pandu Panji<sup>1</sup>, Yunus Yunte<sup>2</sup>, dan Agus Tafuran<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Balai Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Manokwari,

<sup>2</sup>Samdhana Institute

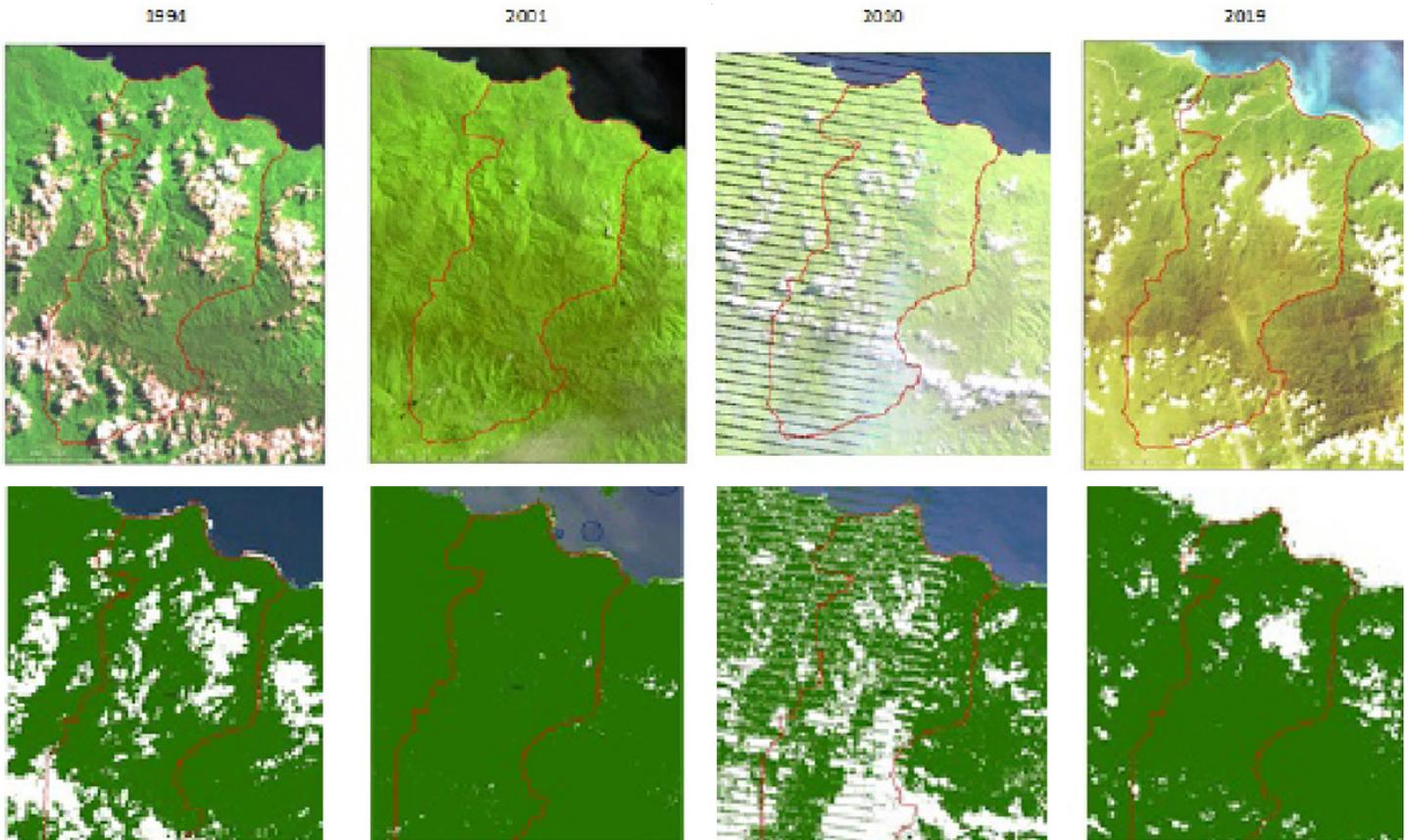
Kepastian hak tenurial masyarakat merupakan elemen dasar untuk mencapai pembangunan rendah emisi. Sebagai bagian dari inisiatif yang lebih luas untuk mendukung komunitas adat, Samdhana Institute bersama organisasi mitra memfasilitasi pemetaan partisipatif di tujuh wilayah adat (Tabel 1). Pemetaan partisipatif menjadi langkah penting dalam upaya menjamin pengakuan hak tenurial. Lebih jauh, pemetaan juga memberikan pemahaman tentang pola transisi hutan. Penelitian ini menyajikan analisis perubahan penggunaan lahan dalam beberapa dekade di tujuh wilayah adat. Penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang peluang dan tantangan dalam mencapai pembangunan rendah emisi di Tanah Papua.

Analisis dinamika tutupan hutan dilakukan dengan melihat tingkat kehilangan tutupan hutan maupun penambahan tutupan hutan, yang disajikan sebagai laju deforestasi dan reforestasi. Analisis perubahan tutupan hutan dilakukan dengan membandingkan data citra Landsat selama 30 tahun terakhir (1990-2020). Hasil temuan ini kemudian diikuti dengan diskusi kelompok terpusat (FGD) bersama komunitas adat dan organisasi mitra untuk mengidentifikasi penyebab dan penghambat deforestasi dan reforestasi. Hasil analisis citra satelit sebagaimana tercantum di bawah ini.

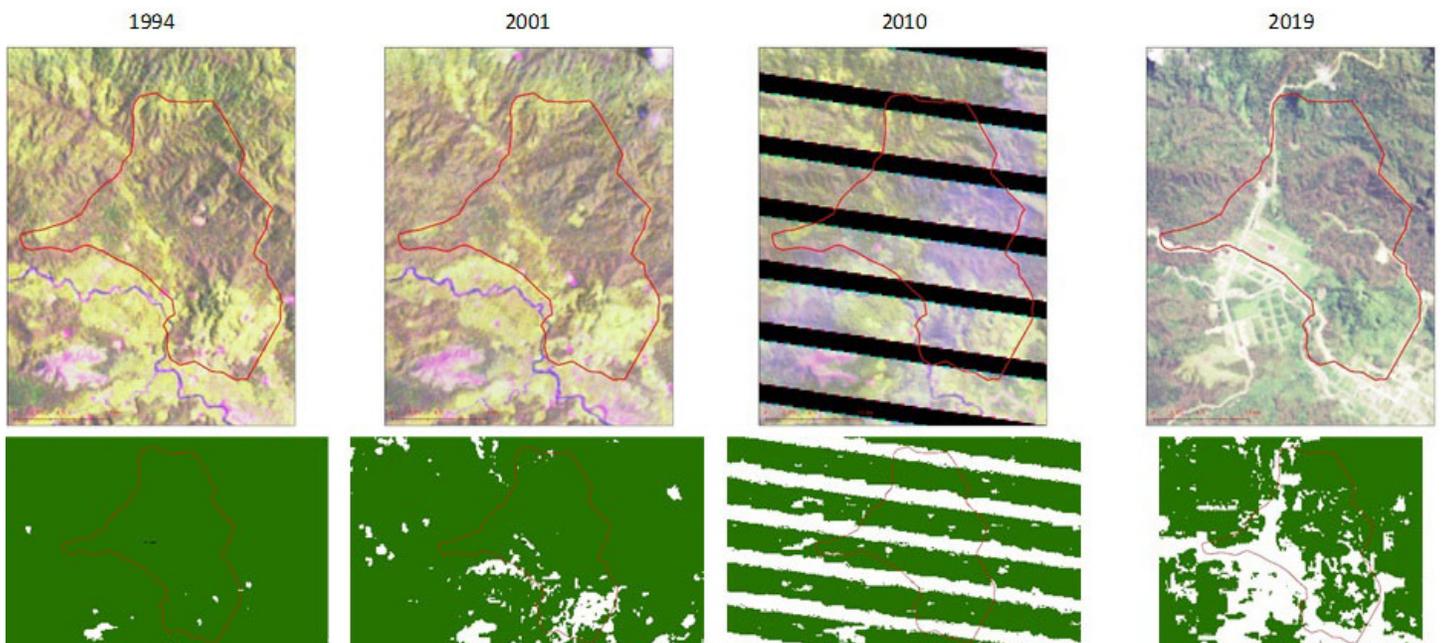
Tabel 1. Lokasi Pemetaan Partisipatif dan Organisasi Mitra

	Wilayah Adat	Kabupaten	Organisasi Mitra
	Papua Barat		
1	Marga Wabia, Suku Mpur	Tambrau	Marwas Nath
2	Marga Baasakof, Suku Abun	Tambrau	AKA WUON
3	Marga Tafii, Suku Miyah	Tambrau	AKA WUON
4	Marga Baho, Suku Maybrat	Maybrat	CDK Maybrat
5	Marga Ogoney, Suku Moskona	Teluk Bintuni	Panah Papua
	Papua		
6	Suku Hubula (19 Marga)	Jayawijaya	YBAW and KPH
7	Suku Yeinan	Merauke	SKP

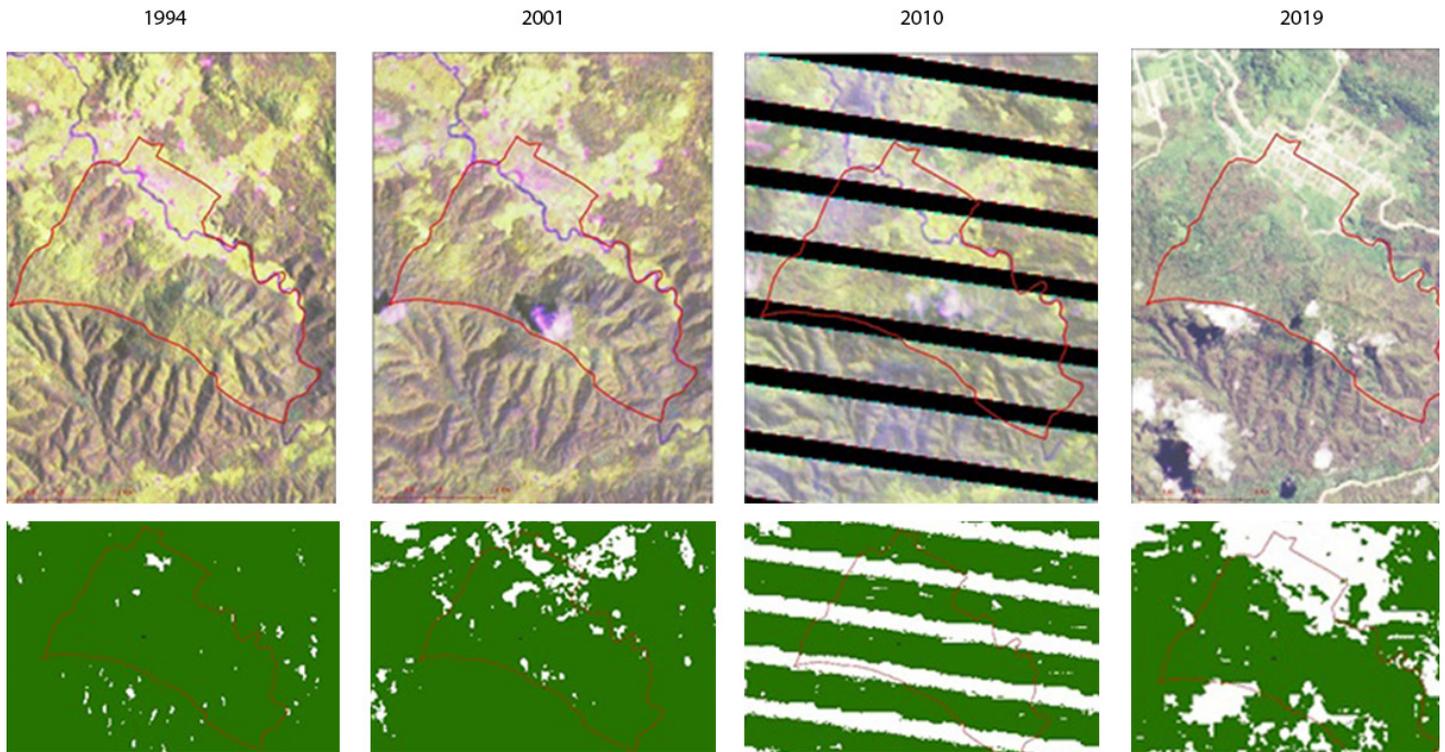
Gambar 1. Perubahan tutupan hutan Wabia



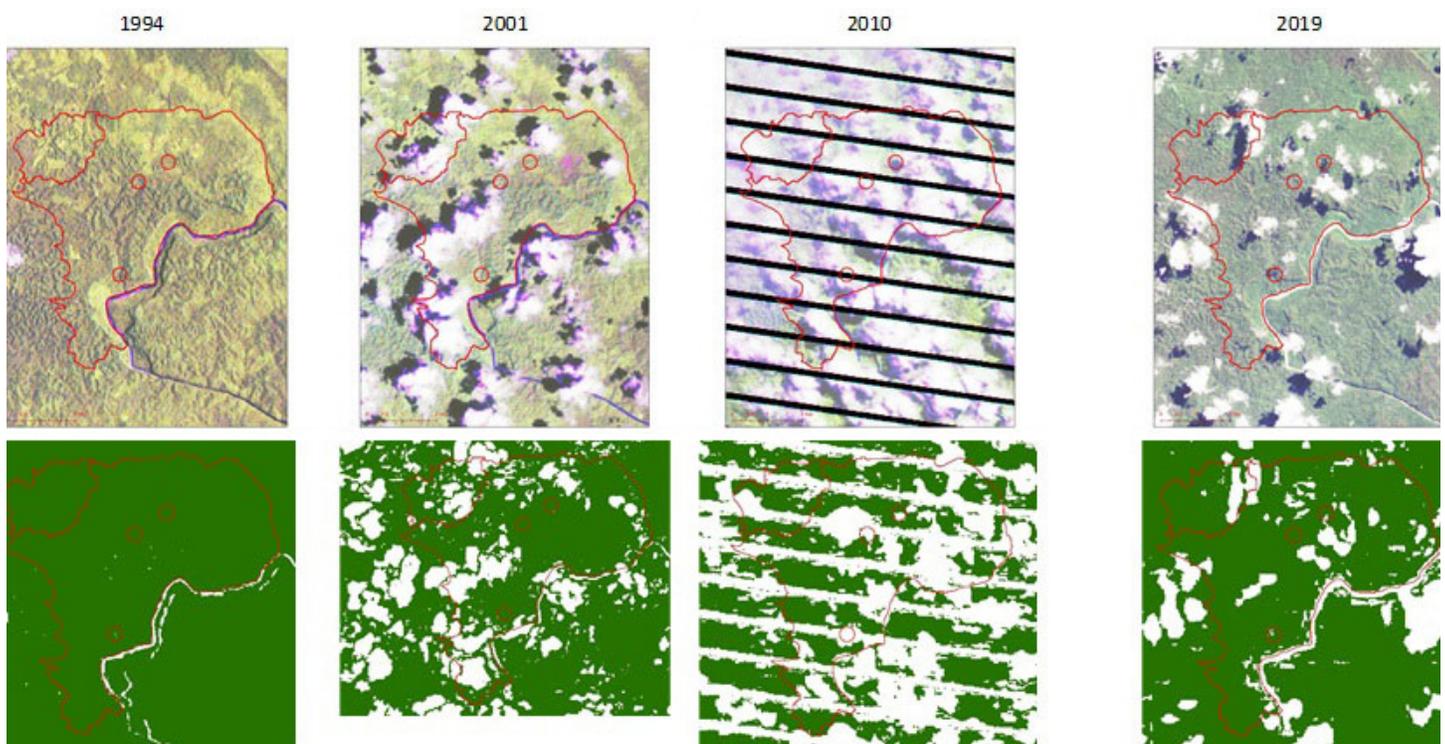
Gambar 2. Perubahan tutupan hutan Baasakof



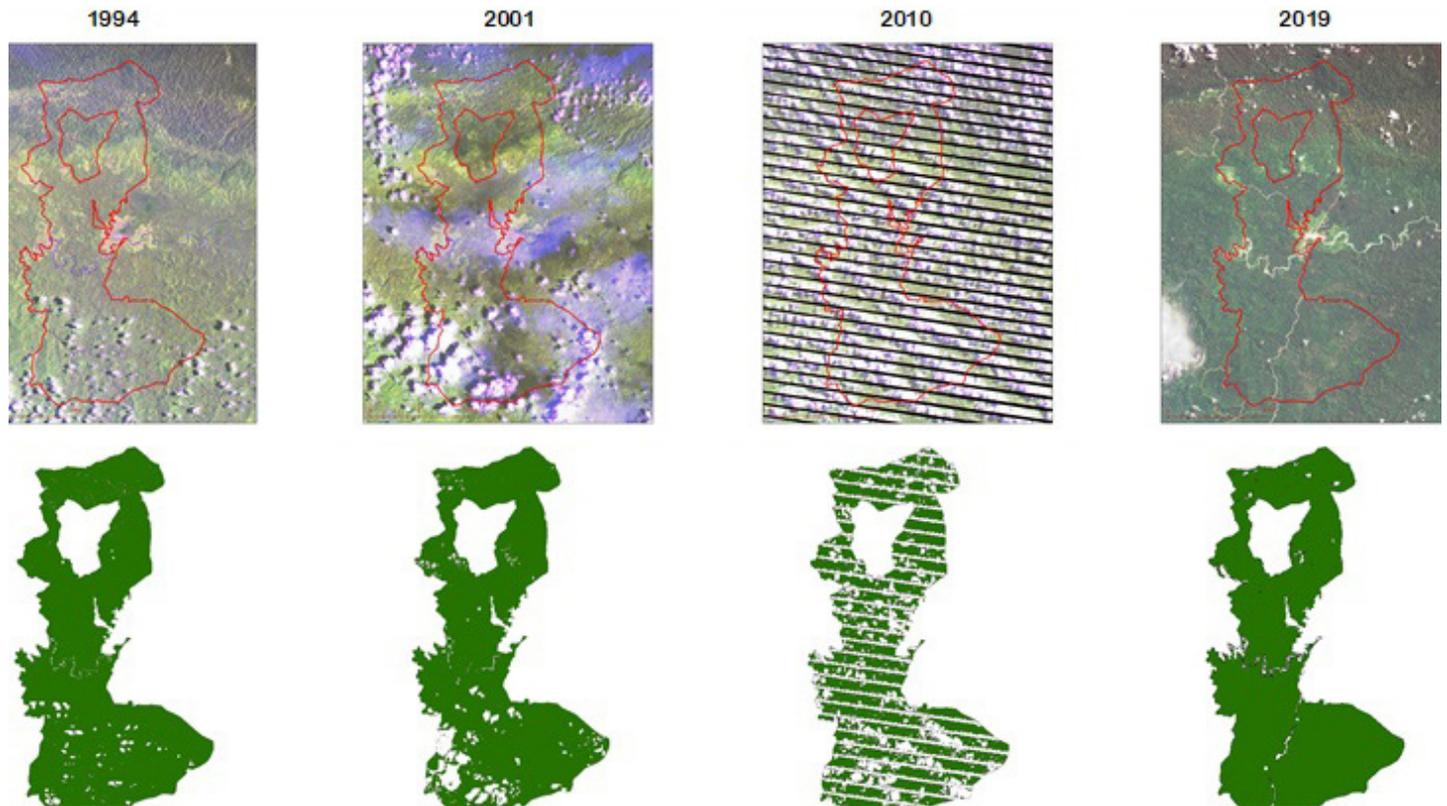
Gambar 3. Perubahan tutupan hutan Tafi



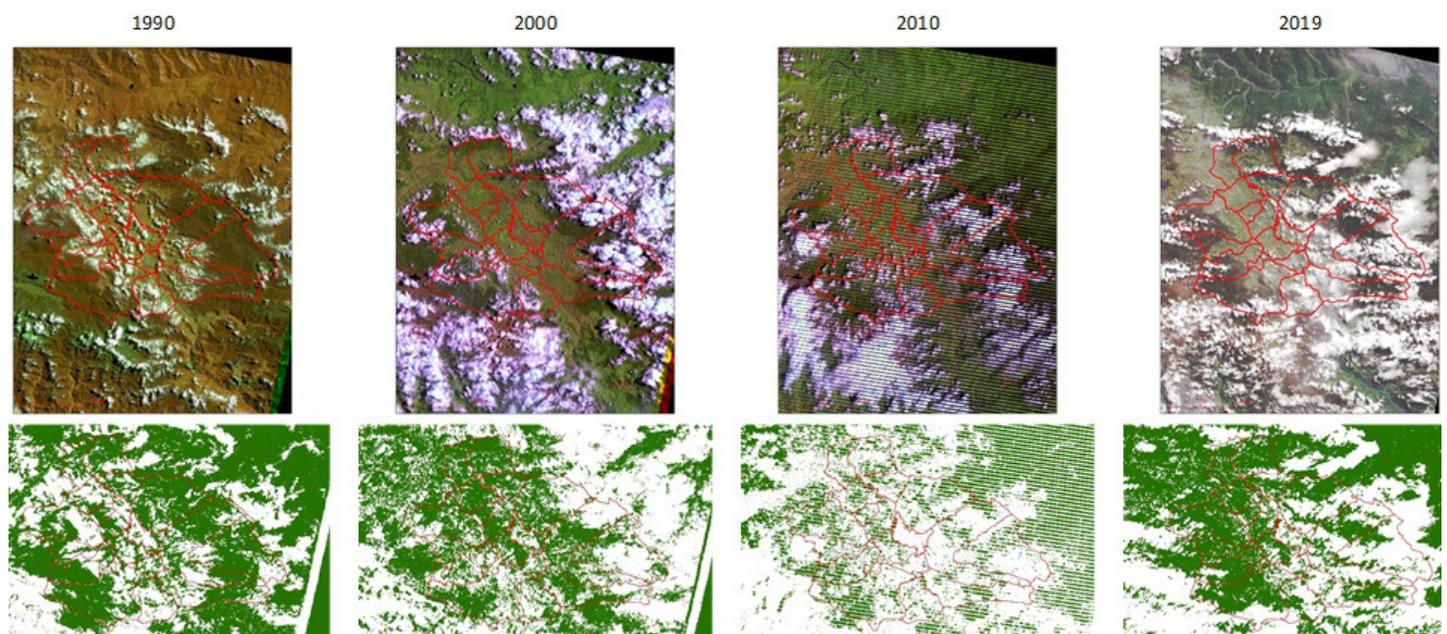
Gambar 4. Perubahan tutupan hutan Baho



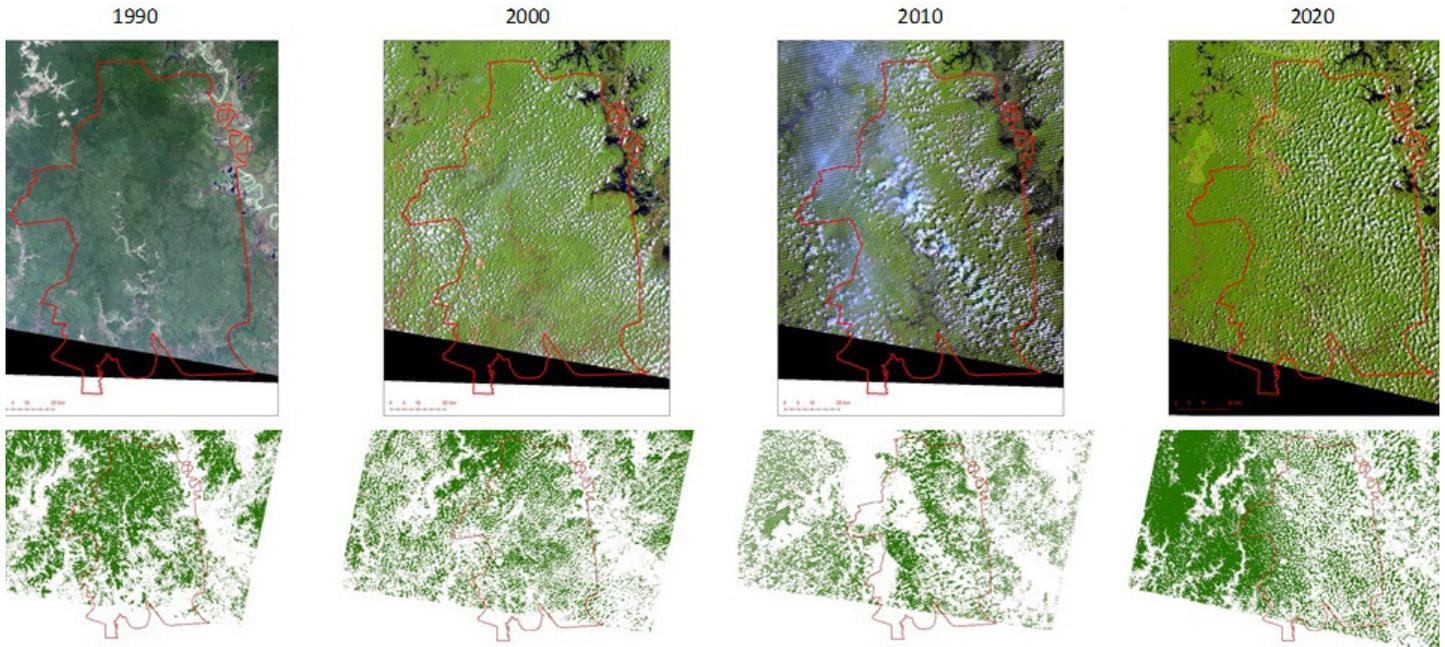
Gambar 5. Perubahan tutupan hutan Ogoney



Gambar 6. Perubahan tutupan hutan Hubula



Gambar 7. Perubahan tutupan hutan Yei



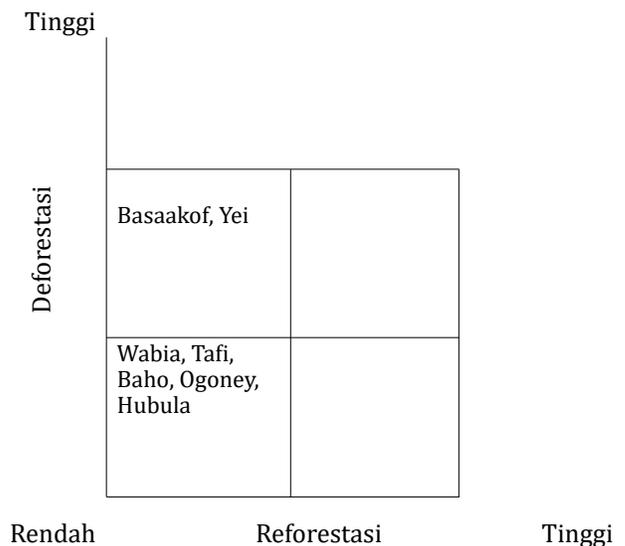
Dari ketujuh wilayah adat, lima diantaranya memiliki histori laju deforestasi yang rendah selama tiga dekade terakhir. Lima wilayah adat itu adalah marga Wabia dan Tafi di Tambraw, marga Ogoney di Teluk Bintuni, marga Baho di Maybrat, dan 19 marga dari suku Hubula di Jayawijaya. Sementara itu, dua wilayah

lainnya, Yei di Merauke dan Baasakof di Tambraw, mengalami laju deforestasi tinggi pada periode yang sama. Tabel 2 dan Gambar 1 berikut mendeskripsikan laju deforestasi tahunan dan pola keseluruhan dari transisi hutan untuk tujuh wilayah adat.

Tabel 2. Laju deforestasi tahunan (ha, %)

			1990-2000	2001-2010	2011-2020
1	Wabia	Ha	0.59	169,25	-104.04
		%	0.00	0.44	-0.28
2	Baasakof	Ha	14.51	-6.94	32.00
		%	1.64	-0.89	3.79
3	Tafi	Ha	8.96	-3.02	15.11
		%	0.96	-0.35	1.68
4	Baho	Ha	16.62	-3.15	13.60
		%	0.57	-0.11	0.48
5	Ogoney	Ha	22.25	84.57	-55.72
		%	0.10	0.40	-0.27
6	Hubula	Ha	2401.54	1835.65	613.23
		%	1.58	1.43	0.56
7	Yei	Ha	-15821.87	-7799.86	1552.15
		%	-5.34	-1.72	0.29

Gambar 8. Pola transisi hutan



## Pendorong Transisi Hutan

Seluruh wilayah adat yang memiliki keragaman geografis. Membentang dari wilayah adat marga Wagia di pantai utara hingga suku Yei yang menempati dataran Merauke di selatan. Wilayah, skala, topografi, kepadatan populasi, penggunaan lahan, dan sistem adat berbeda antarwilayah adat. Hal ini memberikan konteks yang lebih luas tentang transisi hutan di setiap wilayah.

Namun, kajian ini menyoroti beberapa faktor pendorong deforestasi dan reforestasi. Meski narasumber dari setiap komunitas adat memiliki perspektif yang berbeda, diskusi kelompok dengan enam komunitas adat (marga Wabia, marga Baho, marga Ogoney, suku Yei, marga Tafi, dan marga Baasakof) menyoroti kesamaan penyebab perubahan tutupan hutan. Kesamaan ini sebagaimana berikut:

### Pendorong deforestasi:

- *Kebijakan pemerintah mendorong terjadinya pemekaran pemerintahan desa, kecamatan, dan kabupaten.* Pemekaran administratif ini biasanya terjadi setelah pembukaan lahan untuk pembangunan jalan, diikuti pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Secara bersamaan, perluasan tren pemekaran ini menyebabkan meningkatnya pembukaan lahan.

- *Pembangunan jalan baru untuk program pemukiman kembali atau transmigrasi yang disponsori pemerintah.* Di samping pengembangan yang didorong perubahan yurisdiksi, pembangunan jalan juga memicu gelombang migrasi spontan yang mengakibatkan pembukaan lahan.

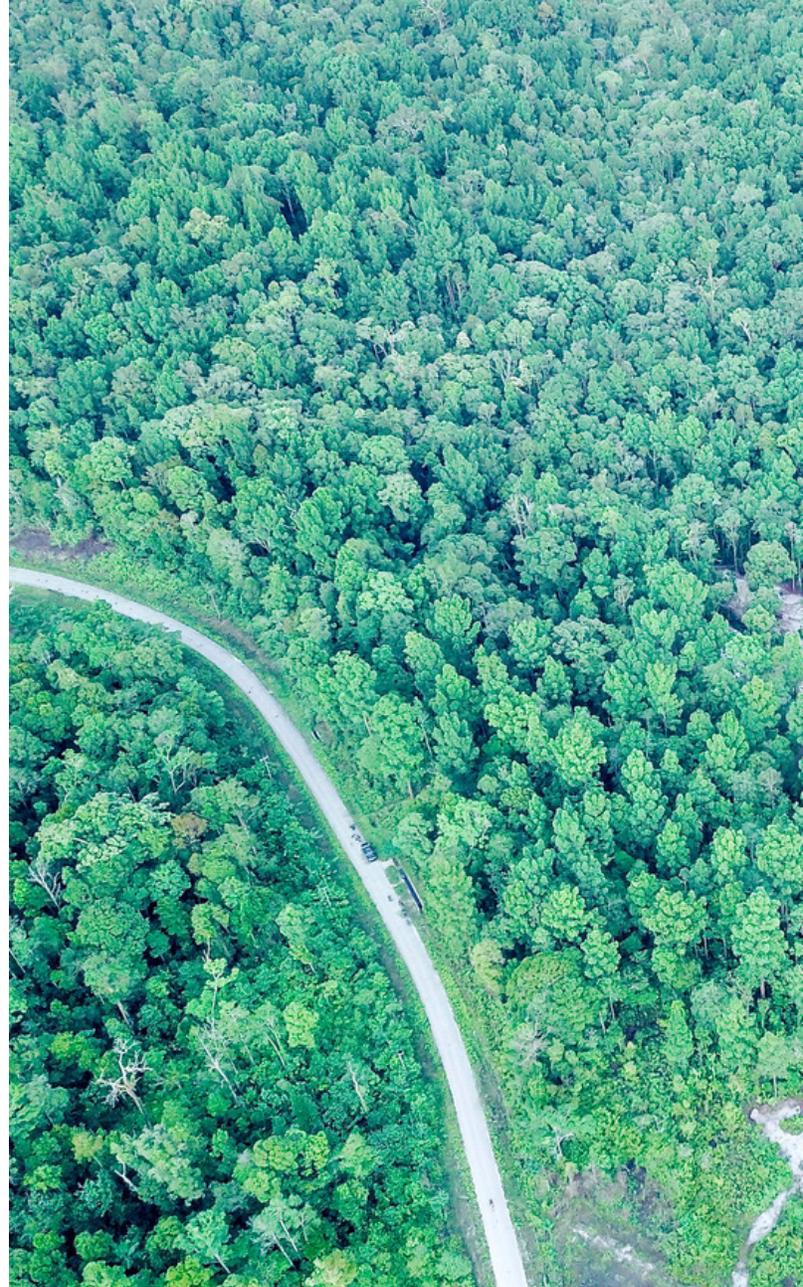
- *Alokasi lahan hutan untuk investasi berbasis-lahan, misalnya untuk perkebunan atau penebangan.* Kebijakan pemerintah membangun industri skala besar memicu pembukaan hutan untuk penggunaan lahan yang lebih intensif.

- *Perubahan sistem nilai masyarakat akibat desakan ekonomi dan melemahnya struktur kelembagaan adat yang memicu tingginya penjualan tanah.* Perubahan yurisdiksi dan inisiatif pembangunan membentuk pasar tanah karena berbagai alasan, seperti infrastruktur dan fasilitas pelayanan publik (jalan, jembatan, dan perkantoran), perumahan individu, serta penggunaan lahan oleh perusahaan, terutama kelapa sawit.

- Faktor kecil dan kurang penting lainnya termasuk bencana alam, misalnya kebakaran hutan dan tanah longsor.

### Penghambat deforestasi:

- *Kekuatan struktur adat, nilai sistem, dan zonasi di wilayah adat.* Di antara komunitas adat, lahan cenderung dibagi lagi menjadi kawasan untuk penggunaan produktif atau area pemukiman, kawasan perlindungan,



dan kawasan sakral. Sistem zonasi ini sangat dikenal anggota komunitas adat, dan dihormati komunitas adat tetangga.

- *Kepadatan populasi yang rendah, yang menyiratkan kebutuhan yang relatif rendah untuk pemukiman baru atau budidaya intensif.* Pembagian desa dan kecamatan memang terjadi, tetapi pada populasi kecil yang tersebar di pedesaan, pembukaan lahan untuk pemukiman baru kurang signifikan.

- *Isolasi dan sulitnya akses ke wilayah adat karena beberapa faktor, semisalnya topografi.* Pedesaan yang jauh dari kota dan pusat pemerintahan dengan profil berbukit tidak mudah diakses.

- *Pemahaman dan kesadaran masyarakat adat tentang fungsi ekologi dan manfaat konservasi hutan dalam mencegah pembukaan hutan.* Kekhawatiran akan bencana lingkungan akibat pembukaan lahan berpengaruh penting bagi masyarakat. Sebagian masyarakat secara aktif telah berhubungan LSM lingkungan dan instansi kehutanan, untuk meningkatkan pemahaman ekologi dan mengembangkan konsep konservasi alam.



- Masyarakat adat tidak memiliki akses pembibitan pohon dan informasi terkait jenis-jenis pohon bernilai yang dapat ditanam untuk reforestasi/rehabilitasi lahan. Masyarakat selama ini melakukan praktik membudidayakan bibit pohon liar dari hutan. Tidak ada laporan program penanaman pohon di wilayah penelitian, tetapi mungkin ada pemahaman yang kompleks tentang dinamika regenerasi ekologi hutan.

### Transisi Hutan di Masa Depan

Pembangunan jalan untuk membuka akses bagaikan pedang bermata dua. Di satu sisi, jalan meningkatkan akses masyarakat adat terhadap informasi, pendidikan, kesehatan, dan manfaat pembangunan lainnya. Namun, di sisi lain, jalan juga meningkatkan kerentanan deforestasi di wilayah adat. Karena sebagian besar wilayah adat berada dalam cakupan distrik, penelitian ini menyarankan perencanaan tata ruang di tingkat distrik. Rencana tata ruang distrik diharapkan mampu menjaga tutupan hutan di wilayah adat yang dibuka aksesnya. Bentuknya, dapat berupa aturan yang mencegah masyarakat agar tidak membuka hutan dan memanfaatkan kayu berlebihan, atau aturan yang mencegah masyarakat menjual tanah ulayat. Penguatan lembaga adat juga diperlukan agar kepentingan wilayah adat terwadahi dalam rencana pembangunan.

Dukungan fasilitasi pengakuan hak ulayat, legalisasi hutan adat, penguatan struktur, nilai adat dan dokumentasi zonasi di wilayah adat, dapat menjadi satu cara menahan deforestasi. Pengakuan hak ulayat dan penetapan hutan adat penting untuk memberikan legalitas dan perlindungan hukum terhadap hak ulayat dan kekuatan yang ada dimasyarakat. Zona pemanfaatan, zona lindung, dan zona keramat dapat memperkuat kontroll komunitas terhadap wilayah adatnya. Informasi zonasi ini perlu diketahui oleh semua anggota adat dan dihormati komunitas adat tetangga.

Di masa depan, penting adanya intervensi dari para pihak, baik pemerintah, swasta, maupun lembaga swadaya masyarakat, perihal upaya meningkatkan tutupan hutan. Bentuknya bisa diskusi, pelatihan, dan pendidikan tentang rehabilitasi hutan untuk memastikan akses informasi bagi masyarakat. Akses informasi mencakup arti penting menjaga hutan, yang berarti juga menjaga keberlanjutan hidup dan budaya masyarakat adat. Kemudahan memperoleh bibit, pupuk, alat pendukung, ketrampilan, dan pengetahuan akan mendorong masyarakat melakukan rehabilitasi secara masif. Begitu juga, konsep wanatani (*agroforestry*) dapat diperkenalkan sehingga manfaat hutan dapat dirasakan masyarakat.

Dalam tiga dekade terakhir, analisis spasial menunjukkan tidak ada wilayah penelitian yang secara signifikan mengalami peningkatan tutupan lahan. Seluruh wilayah penelitian mengalami laju reforestasi yang rendah. Berdasarkan hasil diskusi terpumpun, alasan-alasan berikut sebagai faktor pendorong reforestasi:

- *Persepsi bahwa hutan akan pulih kembali secara alami, tanpa intervensi manusia.* Persepsi ini muncul di antara masyarakat adat dari pemahaman budaya lokal terkait alam secara turun temurun, hutan beregenerasi secara alami. Bahkan untuk kasus bencana alam yang menyebabkan hilangnya hutan, reforestasi tidak dilakukan karena kepercayaan lokal bahwa pemulihan alami akan terjadi.

- *Perbedaan konsep dalam menanam kembali atau menghijaukan kembali area terbuka.* Secara umum, masyarakat menanam lahan kebunnya dengan tanaman musiman. Hanya sebagian kecil tanaman tahunan dan pohon buah-buahan ditanam di ladang kosong, yang membuat inisiatif reforestasi apa pun menjadi tampak kurang terlihat di citra satelit karena lahan yang dibuka dan ditanam kembali cenderung terlihat sama.